

# **PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**

**(Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul)**



## **Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

**Eroby Jawi Fahmi**

NIM 0247 1346

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eroby Jawi Fahmi

NIM : 02471346

Jurusan : Kependidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2008



Yang Menyatakan,

*Eroby Jawi Fahmi*  
Eroby Jawi Fahmi  
02471346

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**NOTA DINAS PEMBIMBING**  
Hal : Skripsi  
Saudara Eroby Jawi Fahmi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Eroby Jawi Fahmi  
NIM : 0247 1346  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Judul :

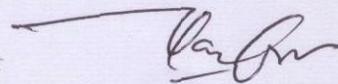
**Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Rumah Pengetahua  
Amartya, Bantul)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Oktober 2008  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag  
NIP. 150 253 888

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**NOTA DINAS KONSULTAN**

Hal : Skripsi  
Saudara Eroby Jawi Fahmi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

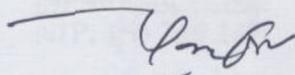
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka selaku konsultan saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Eroby Jawi Fahmi  
NIM : 0247 1346  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Judul :  
**Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul)**

sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Amin.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 31 Oktober 2008  
Konsultan,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag  
NIP. 150 253 888



## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN/ I / DT / PP.01.1 / 70 / 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **Pendidikan Berbasis Masyarakat**  
(Studi Tentang Rumah Pengetahuan  
Amartya, Bantul)

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Eroby Jawi Fahmi

NIM : 0247 1346

Telah dimunaqasyahkan pada : Tgl. 30 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

**Dr. Ahmad Arifi, M. Ag**  
NIP. 150 253 888

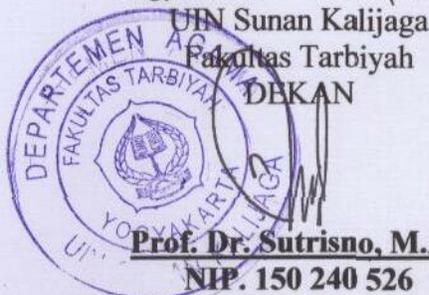
Penguji I

**M. Agus Nuryatno, MA.Ph.D**  
NIP. 150 282 013

Penguji II

**Sibawaihi, M. Ag**  
NIP. 150 368 247

Yogyakarta, 05 November 2008



**Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag**  
NIP. 150 240 526

## HALAMAN MOTTO:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".  
(Q.S. Ali 'Imran: 8)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN**  
***ALMAMATER FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على كل حال و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sahalawat serta salam semoga tercurahka kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga da sahabat-sahabatnya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa ada bantuan dari banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah beserta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah yang telah memberi penulis bekal ilmu yang bermanfaat
2. Bapak Kajar Ketua Jurusan Kependidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan pengarahan selama penyusun studi di Jurusan Kependidika Islam.
3. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar telah memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan sabar selama penulis studi.
5. Kepala Sekolah, guru dan pengelola Rumah Pengetahuan Amartya Bantul yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini. Terima kasih Mas Iman, Mas Zuhdan, Mba' Atik atas bantuannya, dan maaf selalu *ngerepotin*.
6. Abah dan Ibu tercinta, *matur kesuwun* dengan kasih sayang yang tak terbatas kepada penulis, dan *pangapura* belum memberikan yang terbaik bagi Abah dan Ibu. Semoga Dzat Yang Maha Kasih memberikan kasih sayang kepada Abah dan Ibu melebihi kasih sayang yang telah Abah dan Ibu berikan untuk penulis. Amin.
7. Iffana Jauhar Nafizah, seseorang yang telah diutus Tuhan mendampingi penulis dengan penuh kesetiaan dan kesabaran hingga sekarang ini.
8. Bobi, “Tentukan pilihan dan jangan ragu untuk melangkah”. Semoga apa yang dicitakan dapat terwujud tanpa halangan berarti. Amin.
9. *Wa' Dirin*, dan *Mimi Mutim*, *Ang Lilis* dan keluarga, *Ang Uus* dan keluarga, *Ang Jojo* dan keluarga, *Yayu Oom* dan keluarga, dan Chanifah.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, dan Keluarga Besar Komisariat Tarbiyah, yang telah memberikan modal dasar bagi penulis dalam bersosialisasi.
11. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) SINERGI HMI Cabang Yogyakarta; Muslimin, Zam-zam, Islah, Dedi, Kiki, Amin ‘Memet’ dan saudaranya Leo, Ilyas, Andi, Basit, Irul, Rumzah, Eva, Erin, Hurri, Fatah, dan ‘Si Bungsu fulan’ Fian, yang telah memberikan arti dari sebuah perjalanan hidup. Terima kasih semuanya kawan!

12. Keluarga Besar Ikatan Alumni Darussalam Ciamis (IKADA), Jarwo dan Helen (*nuhun nya tos numpang ngeprint*), Aat dan Nisa, Ustad Ojhu, ‘Abah’ Dadan, dan Titin, yang telah memberikan makna hakiki tentang sahabat sejati. *Ka kabehana, hatur nuhun nya!*
13. Keluarga Besar Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) Yogyakarta; Ustad Alek, Bos Oyan, Gober, Wa Juli, Maknawi, Etex, Buwel, Bejho, Encis, dll.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do’a kehadiran Allah SWT, semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.

Yogyakarta, Oktober 2008

Penulis,

Eroby Jawi Fahmi  
0247 1346

## ABSTRAK

Eroby Jawi Fahmi, **Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul)**. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya (RPA), Bantul, serta tinjauan pendidikan Islam terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan mutu pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia, minimal dapat memberikan alternatif bagi pengembangan pendidikan nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengambil latar Rumah Pengetahuan Amartya. Subyek penelitian adalah responden yang terdiri dari Pendiri, Kepala Sekolah, Pengurus Sekolah/Yayasan, Dewan Guru, Orang Tua Didik, Anak Didik dan masyarakat sekitar RPA. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Latar belakang pendirian RPA; *pertama*, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan; *kedua*, pendidikan yang bermutu hanya diperoleh kalangan kelas menengah ke atas saja; *ketiga*, masyarakat sekitar RPA didominasi dari masyarakat kelas bawah tidak dapat mengakses pendidikan bermutu. 2) Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA; *pertama*, pendidikan yang tumbuh, digerakkan, dan dikelola oleh masyarakat; dan *kedua*, pendidikan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. 3) Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA; menyediakan akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin secara gratis, menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat akan realitas sosial-politik-ekonomi dengan melibatkan mereka pada proses pendidikan, diharapkan kelak masyarakat mengambil alih, mengelola, dan menciptakan komunitasnya sendiri. 4) Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA menekankan prinsip solidaritas, egaliter, kebersamaan, dan kaderisasi. 5) Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA; Dukungan (*support*), berbentuk dukungan moril, dan spirituil; Keterlibatan (*involvement*), berbentuk pengambilan keputusan pada penyeleksian siswa, pembuatan kurikulum, dan kegiatan lainnya di luar pembelajaran; Kemitraan (*partnership*), antara masyarakat sekitar dengan RPA terjalin hubungan kemitraan yang sejajar; Kepemilikan (*full ownership*), masyarakat belum secara penuh terlibat dalam hal kepemilikan. Masyarakat belum bisa mengendalikan semua keputusan tentang program-program RPA. 6) Kurikulum mengarah pada tiga tema besar, yaitu tema keluarga, tema masyarakat, dan tema negara. Ketiga tema terbagi dalam tiga macam pelajaran, yaitu pengetahuan dan logika, sastra, bahasa dan budaya, dan olah raga, gerak, dan kreativitas tubuh. Metode pembelajaran bersifat kolektif, praktek, kontekstual dan permainan. Bahan pembelajaran tidak baku, diambil dari pelbagai sumber Evaluasi pembelajaran dilakukan secara kolektif, tidak bersifat ujian (tes) dan individual.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian .....	ii
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	iii
Halaman Nota Dinas Konsultan.....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstraksi .....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Alasan Pemilihan Judul.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH PENGETAHUAN AMARTYA</b>	
A. Lokasi penelitian .....	30
B. Sejarah singkat .....	30
C. Tujuan .....	34
D. Visi Misi.....	35
E. Struktur Organisasi .....	35
F. Program Kegiatan .....	37
G. Keadaan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anak Didik, dan Orang Tua Anak Didik.....	39
H. Keadaan Sarana Prasarana .....	43
<b>BAB III KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI RUMAH PENGETAHUAN AMARTYA (RPA) DAN IMPLEMENTASINYA</b>	
A. Sistem Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA .....	46
B. Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA.....	50
C. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA .....	62

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran-saran.....	73
	C. Kata Penutup .....	74
	DAFTAR PUSTAKA .....	75
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kegiatan dan Pertemuan Tokoh Masyarakat, Orang tua siswa, dan Pengelola RPA.....	56
Tabel 2: Materi dan Jadwal Pelajaran RPA .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
Lampiran II	: Biodata Nara Sumber
Lampiran III	: Peta Lokasi RPA
Lampiran IV	: Hasil Wawancara
Lampiran V	: Hasil Wawancara
Lampiran VI	: Hasil Wawancara
Lampiran VII	: Hasil Wawancara
Lampiran VIII	: Hasil Wawancara
Lampiran IX	: Hasil Wawancara
Lampiran X	: Sekilas tentang RPA
Lampiran XI	: Konsep RPA
Lampiran XII	: Daftar Siswa RPA
Lampiran XIII	: Daftar Guru/Relawan
Lampiran XIV	: Surat Penelitian /Ijin
Lampiran XV	: Surat Penelitian /Ijin
Lampiran XVI	: Surat Penelitian /Ijin
Lampiran XVII	: Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian
Lampiran XVIII	: Bukti Seminar Proposal
Lampiran XIX	: Sertifikat KKN
Lampiran XX	: Sertifikat Pengabdian pada Masyarakat
Lampiran XXI	: Sertifikat PPL II
Lampiran XXII	: Sertifikat TOEC
Lampiran XXIII	: Sertifikat TOAC
Lampiran XXIV	: Sertifikat ICT

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui siapa dirinya, mengembangkan dirinya, dan mengatasi problem dalam kehidupannya.

Begitu pentingnya arti pendidikan dalam kehidupan manusia, sehingga tercantum dalam salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 menyebutkan:

"Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama, berdasarkan kepantasan."<sup>1</sup>

Pendidikan juga merupakan modal utama suatu bangsa. Martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dengan pendidikan, suatu bangsa dapat mengetahui jati dirinya dan mengembangkannya sehingga dapat mengangkat derajat dan martabatnya.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di pelbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah

---

<sup>1</sup> Atnike Nova Sigiro, *Pendidikan Nonformal: Mencari Jawaban terhadap Kebutuhan Pendidikan Masa Depan*, Media Indonesia, 20 Desember 2002, dalam [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Begitu signifikansinya pendidikan bagi bangsa Indonesia, sehingga termaktub dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Perubahan Keempat UUD 1945, dan bahkan secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003).<sup>2</sup>

Namun, pendidikan adalah wilayah penting kehidupan yang kondisinya masih mencemaskan di negeri ini. Cerita tentang anak putus sekolah, atau bahkan tidak memperolehnya sama sekali, tersebar di mana-mana. Ongkos mengakses pendidikan di negeri ini yang tidak murah menjadi salah satu sebabnya.

Pendidikan mahal di negeri ini sudah menjadi rahasia umum, dan yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kelas bawah. Misalnya saja, di pinggiran Kota Tangerang, dengan penghasilan per bulannya Rp. 300.000-Rp. 400.000, seorang ibu buruh cuci harus membiayai pendidikan kedua anaknya sebesar Rp. 160.000 setiap bulannya. Belum termasuk pengeluaran lainnya, seperti baju seragam dan alat-alat sekolah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dalam salah satu penggalan Pembukaan (*preamble*) UUD 1945 disebutkan, bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah "...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa..." Pasal 31 hasil Perubahan Keempat Amandemen UUD 1945 terdiri dari 5 ayat. Pasal 31 ini menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara. Lebih lanjut lihat *UUD'45 dan Amandemennya*, (t.k: Srikandi, 2006).

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terdiri dari 77 pasal yang mengatur secara khusus Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menggantikan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya. Lebih lanjut lihat *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2003)

<sup>3</sup> Tonny D Widiastono, *Pembangunan Manusia Indonesia*, Kompas, 18 Desember 2007, dalam [www.lppmpjogja.diknas.go.id](http://www.lppmpjogja.diknas.go.id)

Hasil studi staf Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Abbas Ghozali dan kawan-kawan, tahun 2003 di 15 provinsi menyebutkan, orang tua siswa SD/MI rata-rata masih harus mengeluarkan Rp. 1, 535 juta per tahun, yaitu untuk buku dan alat tulis (Rp. 223.000), pakaian dan perlengkapan sekolah (Rp. 323.000), transportasi (Rp. 273.000), karyawisata (Rp. 49.000), uang saku (Rp. 433.000), dan iuran sekolah (Rp. 234.000). Untuk SMP/madrasah tsanawiyah, harus dikeluarkan biaya Rp 1,896 juta/siswa, yaitu untuk beli buku dan alat tulis (Rp. 224.000), pakaian dan perlengkapan sekolah (Rp. 333.000), transportasi (Rp. 308.000), karyawisata (Rp. 61.000), uang saku (Rp. 571.000), dan iuran sekolah (Rp 399.000).<sup>4</sup>

Cerita seorang ibu dan data hasil studi tersebut merupakan potret betapa harus terengah-engahnya warga Indonesia dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anaknya. Karena itu, tidak mengherankan jika jumlah angka putus sekolah, buta aksara, anak jalanan, pekerja di bawah umur di Indonesia selalu tinggi dari tahun ke tahun.

Tercatat, berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, hingga akhir tahun 2006, masih 12,88 juta penduduk Indonesia, tersebar di pedesaan dan perkotaan, yang buta aksara. Kondisi ini sedikit lebih baik, dibandingkan di tahun 2005 yang sebanyak 14.595.088 orang.<sup>5</sup>

Sementara berdasarkan survei Komisi Nasional Perlindungan Anak di 33 provinsi pada 2007, ada 11,7 juta anak putus sekolah. Angka ini meningkat dari

---

<sup>4</sup> *Kompas*, 18 Desember 2007, dalam [www.kompas-cetak.com](http://www.kompas-cetak.com)

<sup>5</sup> Irwan Prayitno, *Pendidikan Dalam Perspektif Politik*, Senin, 07 Juli 2008, dalam [www.irwanprayitno.info](http://www.irwanprayitno.info)

tahun sebelumnya yakni 9,7 juta. Pada tahun 2007 juga tercatat ada 155.965 anak yang hidup di jalanan. Sebanyak 2,1 juta anak menjadi pekerja di bawah umur.<sup>6</sup>

Fakta-fakta di atas menunjukkan kondisi warga Indonesia dalam memperoleh pendidikan masih memprihatinkan. Pendidikan di Indonesia masih belum menjadi milik semua lapisan masyarakat. Artinya, di negeri ini masih terjadi diskriminasi dalam memperoleh pendidikan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disebut di awal.

Ini juga berarti bahwa pemerintah belum mampu memberikan pendidikan bagi semua warganya. Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, baik yang tercantum dalam Pembukaan (*preamble*) UUD 1945, maupun Pasal 31 UUD 1945, serta UU Sisdiknas 2003 Pasal 11.<sup>7</sup>

Kondisi di atas juga mengindikasikan bahwa sistem pendidikan formal, masih belum mampu menampung semua masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sistem pendidikan formal yang pada umumnya berlangsung dari pagi hari hingga siang hari, bahkan ada yang *full day school*, menyulitkan anak didik dari masyarakat kelas bawah yang kondisinya ekonominya minim.

Mereka pada umumnya dituntut untuk bekerja, mencari penghasilan untuk meringankan kedua orang tuanya. Di tengah kesibukan bekerja pada usia di bawah umur, sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan sistem sekolah formal.

---

<sup>6</sup> *Republika*, Jumat, 23 Mei 2008, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Dan ayat 2 menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun." Lihat lebih lanjut *Undang-undang no. 20 tahun 2003*, hal. 15.

Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan meninggalkan bangku sekolah dan meneruskan hidupnya dengan bekerja.

Menariknya di tengah kondisi pendidikan yang memprihatinkan tersebut, justru membangkitkan semangat beberapa kalangan untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan berkualitas, dan terjangkau untuk semua kalangan.

Seperti yang dilakukan oleh beberapa aktivis muda Yogyakarta yang mendirikan Rumah Pengetahuan Amartya (RPA), sebuah lembaga pendidikan dasar non-formal untuk masyarakat kelas bawah di Bantul. Sejak berdiri kurang lebih satu tahun lalu hingga sekarang, saat biaya pendidikan di negeri ini semakin mahal. RPA tetap konsisten memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat sekitar dari kelas bawah. Pendidikan gratis ini mempunyai tujuan yang sederhana, yang miskin dapat menikmati pendidikan yang bermutu. Bermutu dalam arti pendidikan yang diperoleh dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu proses pembelajaran di RPA selalu menekankan pada praktek kehidupan sehari-hari.

Proses pendidikan di RPA yang diselenggarakan di sore hari dan terkadang hingga malam hari, memberi kemudahan bagi siswa yang tidak memperoleh pendidikan formal di pagi hari untuk tetap membantu orang tuanya di pagi dan siang hari. Sementara bagi siswa yang memperoleh pendidikan formal di pagi hari, pendidikan di RPA memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam dari yang diajarkan di sekolah formal.

Di samping karena mata pelajaran yang tak jauh berbeda dengan sekolah formal, RPA juga menekankan apa yang disampaikan kepada siswa harus berangkat dari realitas kehidupan keseharian mereka, sehingga pelajaran yang didapat akan jadi bekal pemahaman dalam hidup bermasyarakat dan berperilaku.

Saat sekolah-sekolah lain harus diperoleh dengan biaya yang mahal, RPA justru berdiri untuk menghapus pandangan sekolah itu harus mahal. Bahkan, RPA ingin mengokohkan keyakinan kalau semua orang berhak bersekolah. Jangan sampai karena miskin seseorang kemudian tidak berhak mendapatkan pendidikan. Tidak cukup sampai di situ, RPA mencoba memberikan sebuah pendidikan yang mengembangkan kesadaran dan hak siswa akan pengetahuan. Menyalakan harapan adalah tugas utama pengembangan pendidikan di RPA.

Melihat fenomena inilah peneliti merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep dan pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul, serta tinjauannya menurut Pendidikan Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya?
2. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya?

3. Bagaimana Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya Dilihat dari Perspektif Pendidikan Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya Bantul.
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya Bantul.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat secara teoritis
    - 1) Menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang, terutama penelitian yang berhubungan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat.
    - 2) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan pendidikan untuk semua dan pembangunan yang berkelanjutan.
  - b. Manfaat secara praktis
    - 1) Memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd,I)
    - 2) Memberikan informasi tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa literatur dan karya ilmiah yang peneliti temukan dalam penelaahan pustaka, antara lain:

1. Skripsi:
  - a. Skripsi yang ditulis oleh Syukur Widodo Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) dengan judul “Partisipasi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di Kelurahan Kalibening Salatiga.” Skripsi ini mengupas tentang bagaimana bentuk-bentuk partisipasi dan pengembangan partisipasi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah dalam penyelenggaraan pendidikan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah.
  - b. Skripsi yang ditulis oleh Irma Muthoharoh Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) yang berjudul “Pendidikan Kritis Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program *Peace Building* Oleh Lintas-Interfaith Yogyakarta Di Desa Semoyo, Kecamatan Patuk Gunung Kidul Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang

bagaimana konsep Pendidikan kritis dan pemberdayaan masyarakat oleh Lintas-Interfaith Yogyakarta, pelaksanaan Pendidikan Kritis dan pemberdayaan masyarakat Lintas-Interfaith Yogyakarta di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Gunung Kidul Yogyakarta dan implikasinya terhadap masyarakat sekitar.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Edi Supriadi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001) dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cicadas Kecamatan Binong Subang).” Skripsi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk peran serta masyarakat, respon sekolah terhadap peran serta masyarakat, strategi dalam menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dan langkah-langkah evaluasi terhadap peran serta masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cicadas Binong Subang.

2. Buku:

- a. Buku *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, editor Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, diterbitkan oleh Adicita Karya Nusa Yogyakarta (2001). Buku ini mengupas tentang pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Salah satu babnya

membahas tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat. Dengan sub-babnya yang mengulas tentang konsep dan pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia dalam konteks otonomi daerah.

- b. Buku *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Pelbagai Problem Sosial*, karya Zubaedi yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta (2007). Buku ini menyoroti pelbagai permasalahan pendidikan Indonesia dewasa ini, dan sekaligus menawarkan solusinya. Salah satunya membandingkan antara konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat dengan Pesantren.
- c. Buku *Pendidikan Dan Masyarakat*, yang ditulis oleh Nazili Shaleh Ahmad, penerbit Bina Usaha Yogyakarta (1989). Buku ini mengupas tentang pelbagai permasalahan masyarakat, dan peran pendidikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan tersebut. Beberapa bab dalam buku ini membahas pelbagai prinsip pendidikan masyarakat.

Literatur dan karya ilmiah di atas digunakan peneliti untuk kajian kepustakaan. Dari pelbagai kajian literatur dan karya ilmiah tersebut, belum ada satu pun literatur maupun karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya Bantul.

Sehingga peneliti merasa yakin bahwa penelitian yang dilakukan adalah karya orisinal, bukan hasil duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Pendidikan dan Masyarakat**

Pendidikan, menurut yang tercantum dalam UU Sisdiknas 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.<sup>9</sup>

Pendidikan dalam perspektif Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam.<sup>10</sup>

Sementara tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 3 ialah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Undang-undang No. 20*, hal. 9.

<sup>9</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 70.

<sup>10</sup> Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 28.

“...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>11</sup>

Secara filosofis, tujuan pendidikan dalam perspektif Islam pada hakekatnya yaitu untuk memanusiakan manusia agar ia benar-benar menjadi khalifah di muka bumi. Dan dari proses pendidikan tersebut manusia dapat belajar mengenal dan mengamalkan sifat-sifat ketuhanan yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai identifikasi sendiri yang membedakan dengan kelompok lain, dan hidup di dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik sempit ataupun luas, mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara kelompok itu.<sup>13</sup>

Y. B. Suparlan memberikan definisi masyarakat sebagai kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat pelbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.<sup>14</sup>

Arifin Noor mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 20, hal. 12.

<sup>12</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 102.

<sup>13</sup> A. W. Widjaja, *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*, (Jakarta: Pressindo, 1986), hal. 9.

<sup>14</sup> Y. B Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 85.

<sup>15</sup> M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 85.

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat saling berkaitan erat, serta tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Pendidikan merupakan produk dari kebutuhan masyarakat, karena apabila kita sadari arti pendidikan adalah sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat.

Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain. Wajar pula apabila segala sesuatu yang kita ketahui adalah hasil hubungan timbal balik yang ternyata sudah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat kita.

Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada setiap anggota masyarakat ditanamkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota.

Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu, sesuai corak masing-masing periode zaman, kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial.

Masyarakat, mengutip istilah Ki Hajar Dewantara, juga merupakan salah satu dari Tri Pusat Pendidikan, di samping keluarga dan sekolah.

Artinya, masyarakat merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pendidikan.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berlangsung di luar sistem persekolahan formal (jalur pendidikan non-formal). Pelbagai bentuk di antaranya adalah pendidikan sosial dan pendidikan luar sekolah.<sup>16</sup>

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan, sehingga secara khusus termaktub dan diatur dalam UU Sisdiknas 2003, yaitu pasal 54, 55, dan 56.<sup>17</sup>

## 2. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kemunculan paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (*community based education*) salah satunya dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk pendidikan.<sup>18</sup>

Lahirnya demokratisasi pendidikan memang bukan untuk menyembuhkan pelbagai penyakit pendidikan, seperti menghilangkan diskriminasi pendidikan, atau mendapatkan pendidikan murah dan bermutu. Tetapi setidaknya demokratisasi pendidikan memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama, adil, menghormati

---

<sup>16</sup> Misbah Ulmunir, *Suplemen Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam (Suplemen 1)*, (Jurusan Kependidikan Islam, 2006), hal. 60.

<sup>17</sup> Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, terdiri dari tiga ayat. Pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat, terdiri dari lima ayat Dan, pasal 56 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, terdiri dari empat ayat. Lihat, *Undang-undang No. 20*, hal. 35-37.

<sup>18</sup> Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Pelbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 130.

harkat martabat sesama manusia, dan peluang kerja sama yang dapat memenangkan semua pihak.<sup>19</sup>

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan tertuang dalam UU Sisdiknas 2003, Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Dan ayat 6 yang menyebutkan:

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”<sup>20</sup>

Implikasinya, pendidikan harus dikelola secara otonomi<sup>21</sup>, kolaboratif dan terdesentralisasi, dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi ini berupa kerja sama antara masyarakat (warga) dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan.<sup>22</sup>

Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip "Pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi)."<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 (The New Mind Set of National Education in the 21<sup>st</sup> Century)*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI UII, 2003), hal. 85.

<sup>20</sup> *Undang-undang No. 20*, hal. 12-13.

<sup>21</sup> Mastuhu, *Menata Ulang*, hal. 86.

<sup>22</sup> Zubaedi, *Pendidikan*, hal. 130.

<sup>23</sup> Soenardi Dwidjosusastro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dilihat dari Perspektif Desentralisasi Pendidikan*, dalam [www.digilib.ui.edu](http://www.digilib.ui.edu).

Otonomi, dan desentralisasi pendidikan akan berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sendiri.<sup>24</sup>

Artinya, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, dan institusi pendukungnya, dalam penyelenggaraan pendidikan, akan lebih besar dari pada pemerintah pusat.<sup>25</sup>

Sebagai konsekuensi konsep tersebut, maka pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan suatu keharusan. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Pendidikan Berbasis Masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri.<sup>26</sup>

Secara konseptual, Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.” Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Dan

---

<sup>24</sup> Zubaedi, *Pendidikan*, hal. 131.

<sup>25</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hal. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 132.

pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.<sup>27</sup>

Sementara itu Indra Djati Sidi menjelaskan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan konsepsi yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Lebih jauh dari itu, menurutnya, Pendidikan Berbasis Masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan pendidikan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, Pendidikan Berbasis Masyarakat selain memberikan rasa memiliki (*sense of belonging*) bagi anggota masyarakat terhadap sekolah yang dibinanya, juga menciptakan iklim keterbukaan dan memberikan kontrol bagi sekolah dalam mengelola sumberdaya dan mutu pendidikan yang ingin dicapai.

Penjelasan mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat juga dijabarkan dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 1 ayat 16, yang berbunyi:

“Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.”<sup>29</sup>

Dalam konteks Indonesia, Pendidikan Berbasis Masyarakat menunjuk pada pengertian beragam, antara lain; a. Peran serta masyarakat

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 131-132.

<sup>28</sup> Indra Djati Sidi, Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan, *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan*, Vol. 3, No. 1/2001.

<sup>29</sup> Undang-undang No. 20, hal. 10.

dalam pendidikan; b. Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah; c. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan; d. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta; e. Pendidikan Luar Sekolah yang disediakan pemerintah; f. Pusat kegiatan belajar masyarakat; g. Pendidikan Luar Sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grassroot organization*), seperti LSM, dan pondok pesantren.<sup>30</sup>

Umberto Sihombing mendefinisikan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai pendidikan yang berada di masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat, dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat.<sup>31</sup>

Sementara Dean Nielsen menguraikan arti Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai berikut; arti “pendidikan” mengacu kepada pendekatan-pendekatan sistemik dalam belajar-mengajar, termasuk pelatihan; “berbasis” menunjuk pada derajat kepemilikan. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendalian secara penuh; dan “masyarakat” menunjuk pada sekumpulan orang-orang yang hidup dalam hubungan yang akrab satu sama lain. Dari uraian tersebut, Dean Nielsen mendefinisikan secara umum bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat

---

<sup>30</sup> Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia*, dalam *Reformasi Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed), (Yogyakarta: Adi Cita, 2001), hal. 175-176.

<sup>31</sup> Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, dalam *Reformasi Dalam Konteks*, hal. 188.

adalah pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Adapun tujuan utama dari Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan.
- b. Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural.
- c. Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah.
- d. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, serta peningkatan efisiensi manajemen pendidikan.
- e. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar.

---

<sup>32</sup> Dean Nielsen, *Memetakan*, hal. 176-177.

<sup>33</sup> Pokja Pendidikan Berbasis Masyarakat, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Sebuah Usulan Program*, dalam *Reformasi Dalam Konteks*, hal. 200.

Untuk memetakan dan mengukur 'derajat kepemilikan' Pendidikan Berbasis Masyarakat, Dean Nielsen memaparkannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Dukungan (*support*): Orang tua, dan anggota masyarakat memberikan sumbangan dana atau tenaga.
- b. Keterlibatan (*involvement*): Orang tua, dan anggota masyarakat terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan, misalnya tentang jadwal sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Kemitraan (*partnership*): Orang tua, dan anggota masyarakat menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, misalnya tujuan pendidikan, tujuan program, alokasi dana, dan ketenagaan.
- d. Kepemilikan (*full ownership*): para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan tentang program.

Umberto Sihombing menjelaskan beberapa peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

Pertama, *Tokoh masyarakat* (termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidika.

---

<sup>34</sup> Dean Nielsen, *Memetakan*, hal. 178-179.

<sup>35</sup> Umberto Sihombing, *Konsep*, hal. 192-193.

Kedua, *Organisasi kemasyarakatan* berperan sebagai pemrakarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan, dan pemecah masalah.

Ketiga, *Lembaga Swadaya Masyarakat* berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, penyedia tenaga ahli, dan pengelola program.

Keempat, *Lembaga usaha/Perusahaan*, baik milik pemerintah maupun swasta/masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, berperan sebagai penyelenggara pendidikan, penyedia fasilitas, penyedia tutor/instruktur, penyedia dana pendidikan, penyedia fasilitas pasar, dan sebagai mitra usaha dalam mengelola produksi dari usaha keterampilan yang telah dipelajari.

Sementara beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat, antara lain: mampu beradaptasi (*adaptability*), tumbuh (*growth*), memiliki integritas (*integrity*), dan memanfaatkan potensi lokal (*locality*).<sup>36</sup>

Secara lebih luas Michael W Galbraith menjelaskan prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Sjafari, *Pendidikan Berbasis Komunitas*, Selasa 29 Januari 2008, dalam [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com)

<sup>37</sup> Zubaedi, *Pendidikan*, hal. 137-139.

- a. Menentukan Sendiri (*Self determination*). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- b. Menolong diri sendiri (*Self help*). Menjadi anggota masyarakat bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik.
- c. Pengembangan kepemimpinan (*Leadership development*). Melatih pemimpin-pemimpin lokal dalam pelbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok.
- d. Lokalisasi (*Localization*). Memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pelayanan, program, dan kesempatan dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- e. Keterpaduan pemberian pelayanan (*Integrated delivery of service*). Adanya hubungan antar-agensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- f. Mengurangi duplikasi pelayanan (*Reduce duplication of service*). Masyarakat memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan, dan sumber daya manusia dalam

lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.

- g. Menerima perbedaan (*Accept diversity*). Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Menuntut perwakilan anggota masyarakat seluas mungkin dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program, serta pelayanan dan aktifitas-aktifitas masyarakat.
- h. Tanggung jawab kelembagaan (*Institutional responsiveness*). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah secara terus menerus.
- i. Pembelajaran seumur hidup (*Lifelong learning*). Kesempatan belajar harus tersedia untuk semua umur dalam pelbagai jenis dan latar belakang masyarakat.

Untuk melaksanakan Pendidikan Berbasis Masyarakat setidaknya mensyaratkan lima hal.<sup>38</sup>

*Pertama*, teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata masyarakat. *Kedua*, ada lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. *Ketiga*, program belajar yang akan dilakukan bernilai

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 139-140.

sosial atau bermakna bagi kehidupan anak didik atau warga belajar. Oleh karena itu, perancangannya didasarkan pada potensi lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.

*Keempat*, program belajar menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Dan *kelima*, aparat pendidikan tidak menangani sendiri programnya, namun bermitra dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program.

Terkait dengan kurikulum dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat, Brookfield menjelaskan bahwa kurikulum Pendidikan Berbasis Masyarakat harus terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, masalah yang diangkat relevan dengan kebutuhan masyarakat, urutan pembelajarannya tergantung kepada warga belajar, waktu belajarnya fleksibel, menggunakan konsep keterampilan fungsional, menggunakan pendekatan andragogi, dan tidak menggunakan ijazah.<sup>39</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya, dalam penelitian ini data yang dihasilkan didapatkan secara langsung di lapangan. Baik data tertulis, maupun data yang berupa lisan dari orang-orang atau perilaku yang diteliti.

---

<sup>39</sup> Umberto Sihombing, *Konsepsi*, hal. 187-188.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>40</sup>

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan semacam ini, peneliti berharap akan memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul.

## 2. Metode Penentuan Subyek

Karakteristik dari penelitian deskriptif adalah subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.<sup>41</sup>

Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Pendiri, Kepala Sekolah, Pengurus Sekolah/Yayasan, Dewan Guru, Orang Tua Didik, Anak Didik dan masyarakat sekitar Rumah Pengetahuan Amartya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Lebih lanjut adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang

---

<sup>40</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 64.

<sup>41</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 66.

diselidiki.<sup>42</sup> Observasi dilakukan dengan cara langsung, baik secara partisipan maupun non-partisipan.<sup>43</sup>

Secara partisipan, peneliti melakukan pengamatan langsung di Rumah Pengetahuan Amartya dengan menjadi anggota kelompok, ikut ambil bagian, atau melibatkan diri pada situasi subyek yang diteliti. Sedangkan secara non-partisipan peneliti melakukan hal sebaliknya.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>44</sup>

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat masalah-masalah inti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>45</sup>

Dengan demikian, wawancara dikemukakan dengan kalimat bebas, tidak terpaku pada pedoman, tetapi dikembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan.

---

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hal 136.

<sup>43</sup> Mohammad Nasir, *Metode*, hal. 214.

<sup>44</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 128.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 236.

Pedoman wawancara hanya digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari permasalahan pokok yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang letak geografis, sejarah berdiri, dasar tujuan pendidikan, struktur organisasi, keadaan guru, anak didik dan segala hal tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-induktif. Analisis deskriptif yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan, mengklasifikasikan, dan membandingkan fenomena-fenomena.<sup>47</sup>

Analisis induktif adalah analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-

---

<sup>46</sup> S. Margono, *Metodologi*, hal 181.

<sup>47</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), hal. 104.

fakta atau peristiwa-peristiwa khusus konkret itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>48</sup>

Peneliti juga menggunakan metode Triangulasi dalam mengecek keabsahan dan validitas data. Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, metode Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul. Membahas tentang letak geografis-demografis, sejarah berdiri, status lembaga, visi-misi, program pendidikan, struktur organisasi, sarana-prasarana, keadaan guru, karyawan, orang tua didik, dan anak didik Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hal 42.

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 330.

Bab III Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul dan Implementasinya. Membahas tentang konsep dan pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul. Dalam bab ini juga membahas tinjauan Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA.

Bab IV Penutup. Berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA

Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA lahir dengan ide besar untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan, menyamaratakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kalangan miskin, dan mendekatkan proses pendidikan dengan realitas kehidupan.

Ada dua pengertian tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat yang berjalan di RPA; pertama, pendidikan yang tumbuh, digerakkan, dan dikelola oleh masyarakat; dan kedua, pendidikan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA adalah menyediakan akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin secara gratis, menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat akan realitas sosial-politik-ekonomi dengan melibatkan mereka pada proses pendidikan, diharapkan kelak masyarakat mengambil alih, mengelola, dan menciptakan komunitasnya sendiri.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA antara lain; aktivis gerakan sosial di Yogyakarta, pengelola RPA,

pendidik, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat serta masyarakat di sekitar Dusun Plakaran dan Ngipik.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA menekankan prinsip solidaritas, egaliter, kebersamaan, dan kaderisasi.

## 2. Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA

Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA, dari segi dukungan (support), dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap RPA, lebih banyak berbentuk dukungan moril, dan spirituil. Keterlibatan (involvement), masyarakat sekitar RPA ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pada penyeleksian siswa, pembuatan kurikulum, dan kegiatan lainnya di luar pembelajaran. Kemitraan (partnership), antara masyarakat sekitar dengan RPA terjalin hubungan kemitraan yang sejajar. Kepemilikan (full ownership), masyarakat belum secara penuh terlibat dalam hal kepemilikan. Masyarakat belum bisa mengendalikan semua keputusan tentang program-program RPA.

Kurikulum didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan realitas kehidupan masyarakat dengan melakukan riset lapangan terlebih dahulu. Kurikulum mengarah pada tiga tema besar, yaitu tema keluarga, tema masyarakat, dan tema negara. Ketiga tema ini didasari pemikiran bahwa pada dasarnya setiap individu itu belajar dari masyarakat, keluarga dan negara. Tujuannya, diharapkan siswa dapat mengetahui permasalahan yang akan dihadapi hari ini dan hari esok, baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun negara. Ketiga tema

tersebut terbagi atau tercakup dalam tiga macam pelajaran, yaitu pengetahuan dan logika, sastra, bahasa dan budaya, dan olah raga, gerak, dan kreativitas tubuh. Metode pembelajaran lebih bersifat kolektif, praktek, kontekstual dan permainan. Bahan pembelajaran diambil dari pelbagai sumber, baik yang tersedia di perpustakaan yang ada di RPA maupun dari sumber lainnya yang relevan. Untuk mengetahui perkembangan siswa, evaluasi yang dilakukan tidak pernah bersifat individual, tetapi evaluasi dilakukan secara kolektif. Indikator keberhasilan pembelajaran tidak dilihat dari segi kognitifnya saja, tetapi juga melihat aspek psikomotorik dan afektif.

### 3. Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA

Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA yang bertujuan menyediakan akses pendidikan yang lebih besar bagi semua kalangan, menyamaratakan kesempatan memperoleh pendidikan, dan menghapuskan diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan merupakan sebuah wujud pemenuhan hak dan kewajiban manusia dalam mencari, mendapatkan, dan menyediakan pendidikan.

Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA, sebagai pendidikan yang melibatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan, dan sebagai wujud pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta pendidikan yang berangkat dari kebutuhan realitas

masyarakat, merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban anggota masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan.

Dari pelbagai penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA merupakan sebuah wujud implementasi dari konsepsi Islam tentang Pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi manusia, dan pendidikan adalah tanggung jawab bersama (sosial).

## **B. Saran-saran**

Saran-saran untuk Rumah Pengetahuan Amartya:

1. Untuk ke depan, sebaiknya, peran serta dan pelibatan masyarakat lebih diluaskan, tidak sekedar sebagai pemberi pertimbangan dan masukan-masukan.
2. Status badan hukum RPA sebaiknya dipertegas. Sehingga wujud RPA dapat mudah dikenal di masyarakat luas.
3. Pembuatan profil RPA dalam bentuk tertulis sebaiknya dibakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Baik dalam wujud buku ataupun dalam bentuk situs di internet.
4. Untuk pengembangan kelembagaan yang lebih baik, sebaiknya, dilakukan strukturisasi kelembagaan secara internal. Penguatan kelembagaan secara internal akan berdampak baik bagi kelangsungan dan perkembangan RPA ke depan.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, selayaknya peneliti lantunkan, teriring selesainya penelitian dan penulisan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan petunjuk-Nya, mustahil peneliti dapat menyelesaikannya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Sang Pembawa Ajaran Islam, Rasulullah SAW.

Terima kasih, sepatutnya peneliti haturkan, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangsih sekecil apapun terhadap proses penelitian dan penulisan skripsi ini, semoga Dzat Yang Maha Pemurah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Sekali lagi, *haturnuhun*.

Kepada semua pihak pula, saran kritiknya sangat peneliti harapkan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Oktober 2008  
Peneliti,

Eroby Jawi Fahmi  
NIM: 0247 1346

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati,  
1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdurrahman An-Nahlawi,  
1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Abdullah Idi & Toto Suharto,  
2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Achmadi,  
2005. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al Quran dan Terjemahnya*,
- A. W Widjaja,  
1986. *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Jakarta : Pressindo.
- Dede Rosyada,  
2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Eko Prasetyo,  
2008. "Mimpi Rumah Pengetahuan Amartya (Artikel untuk kawan-kawan dekat)". *Makalah yang disampaikan dalam Wokrshop (Kongres) RPA 5-6 Juli 2008 di Kaliurang*.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi, (ed),  
2001. *Reformasi Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adi Cita.
- Hujair AH Sanaky,  
2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta : Safiria Insania Press dan MSI UII.
- Indra Djati Sidi,  
2001. "Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan". *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan Vol. 3, No. 1/2001*.
- Inilah Rumah Pengetahuan Kita!*,  
t.t. t.k : t.p.
- Jasa Ungguh Muliawan,

2005. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong,  
1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mastuhu,  
1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos.
- Mastuhu,  
2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 (The New Mind Set of National Education in the 21<sup>st</sup> Century)*. Yogyakarta : Safiria Insania Press & MSI UII.
- Misbah Ulmunir,  
2006. *Suplemen Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam (Suplemen I)*. Yogyakarta : Jurusan Kependidikan Islam.
- Misbah Ulmunir dkk,  
2006. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Program Studi Kependidikan Islam*. Yogyakarta : Jurusan Kependidikan Islan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Muhaimin & Abdul Mujib,  
1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung : Trigenda Karya.
- Mohammad Nasir,  
1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad Zuhdan,  
“Memoar Kepala Sekolah RPA”. *Makalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Sekolah RPA 2007-2008, dalam Workshop RPA, 5-6 Juli 2008 di Kaliurang*.
- M. Arifin Noor,  
1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Pustaka Setia.
- Nana Sudjana & Ibrahim,  
2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Suharsimi Arikunto,  
1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi,  
1984. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- S. Margono,

2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang,  
1996, *Dasar-dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*.  
Surabaya : Karya Abditama.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Yogyakarta :  
Media Wacana.
- UUD'45 dan Amandemennya*. 2006. t.k : Srikandi.
- Y. B Suparlan,  
1990. *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.
- Zakiah Daradjat,  
2000, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zubaedi,  
2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap  
Pelbagai Problem Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.